

BURO PANDUAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2002

STRATEGI MEMBERANTAS KORUPSI

Elemen Sistem Integritas Nasional



JEREMY POPE

Kata Pengantar:

Erry Riyana Hardjapamekas



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA



YAYASAN OBOR

YAYASAN OBOR INDONESIA

DAFTAR ISI

Catatan Penulis	vii
Prakata,	
<i>Oscar Arias Sanchez</i>	x
Pengantar,	
<i>Peter Eigen</i>	xviii
Kata Pengantar,	
<i>Erry Riyana Hardjapamekas</i>	xxi
Ikhtisar	xxiii
 BAGIAN I: KERANGKA ANALISIS	 1
1. Tantangan Pembaruan	3
2. Anatomi Korupsi	30
3. Mengembangkan Jawaban	44
4. Sistem Integritas Nasional	61
5. Membangun Kemauan Politik	76
 BAGIAN II: PILAR-PILAR KELEMBAGAAN SISTEM IN- TEGRITAS NASIONAL	 87
6. Legislatif yang Terpilih	89
7. Peranan Eksekutif	112
8. Sistem Peradilan yang Independen	120
9. Auditor-Negara	141
10. Ombudsman	155
11. Badan Anti-Korupsi Independen	177
12. Pelayanan Publik Bertugas Melayani Publik	195
13. Pemerintah Daerah	213
14. Media yang Independen dan Bebas	220
15. Masyarakat Sipil	239
16. Sektor Perusahaan Swasta	254
17. Pelaku dan Mekanisme Internasional	282

BAGIAN III: PERATURAN DAN PRAKTIK BAGI PILAR-PILAR KELEMBAGAAN	303
18. Pemilihan Umum Bebas dan Adil	305
19. Hukum Administrasi — Uji Materi Tindakan Pemerintah	313
20. Etika Pelayanan Publik, Memantau Harta Kekayaan, dan Menguji Integritas	324
21. Konflik Kepentingan, Nepotisme, dan Perkoncoan	357
22. Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Tempat Dimana Sektor Publik dan Sektor Swasta Menjalankan Tawar-Menawar	377
23. Pengelolaan Keuangan yang Baik	406
24. Hak Mendapat Informasi — Informasi, Penyadaran Publik, dan Dokumen Publik	428
25. Memberi Warga Masyarakat Kesempatan Bersuara	450
26. Kebijakan Persaingan dan Pencegahan Korupsi	471
27. Undang-undang Anti-Korupsi	489
28. Survei sebagai Alat – Mengukur Kemajuan	519
BAGIAN IV: MEMETIK PELAJARAN	533
29. Pelajaran yang Dapat Dipetik — Laporan Kemajuan	535
BAGIAN V: LAMPIRAN	553
Lampiran Praktik Terbaik untuk Memberantas Korupsi	555
Daftar Pustaka	625
Indeks menurut Subjek	639
Indeks menurut Negara	668